

Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Digital untuk Pemerintah Desa

Ryan Hamonangan^{1*}, Saeful anwar², Ibnu Hajar³, Ike Suryani Dewi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Teknik Informatika, STMIK IKMI Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email: ^{1*}ryanhamonangan.ikmi@gmail.com, ²saefulanwar.ikmi@gmail.com,
³ibnuhajar.ikmi@gmail.com, ⁴ikesuryanidewi.ikmi@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak– Dalam era digital, sistem informasi kearsipan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung tata kelola administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan desa. Banyak desa di Indonesia masih menggunakan sistem pencatatan arsip secara manual yang rentan terhadap kehilangan data, kerusakan fisik dokumen, dan lambatnya proses pencarian kembali informasi. Program pengabdian ini bertujuan untuk menerapkan sistem informasi kearsipan berbasis digital pada pemerintahan desa guna meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan publik. Metode yang digunakan mencakup analisis kebutuhan mitra, perancangan sistem, implementasi perangkat lunak, pelatihan pengguna, dan evaluasi hasil. Sistem yang dikembangkan memungkinkan digitalisasi dokumen, pengelompokan arsip, dan pencarian data secara cepat, serta dilengkapi dengan fitur keamanan untuk menjaga integritas informasi. Hasil dari implementasi menunjukkan bahwa perangkat desa mampu memahami dan mengoperasikan sistem dengan baik setelah mengikuti pelatihan. Sistem informasi ini secara nyata mempercepat proses pencarian dokumen dan mengurangi risiko kehilangan data. Selain itu, penerapan sistem juga berdampak pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat. Kesimpulannya, penerapan sistem informasi kearsipan berbasis digital merupakan solusi inovatif dan aplikatif untuk menjawab tantangan pengelolaan arsip desa secara modern.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Kearsipan Digital, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik, Pengelolaan Dokumen

Abstract– In the digital era, an archival information system is an important requirement in supporting effective and efficient administrative governance in the village government. Many villages in Indonesia still use a manual archive recording system that is vulnerable to data loss, physical damage to documents, and the slow process of retrieving information. This service program aims to implement a digital-based archival information system in the village government to improve administrative performance and public services. The methods used include partner needs analysis, system design, software implementation, user training, and evaluation of results. The developed system enables document digitization, archive grouping, and fast data search, and is equipped with security features to maintain information integrity. The results of the implementation showed that village officials were able to understand and operate the system well after the training. The information system significantly speeds up the document search process and reduces the risk of data loss. In addition, the implementation of the system also has an impact on improving transparency, accountability and professionalism in services to the community. In conclusion, the implementation of a digital-based archival information system is an innovative and applicable solution to address the challenges of modern village archive management.

Keywords: Information Systems, Digital Archives, Village Government, Public Services, Document Management

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan arsip dan dokumen. Namun, banyak desa masih menggunakan sistem pencatatan manual yang kurang efisien, berisiko terhadap kehilangan data, serta menyulitkan dalam pencarian kembali dokumen yang diperlukan. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, sekitar 70% pemerintah desa di Indonesia masih menggunakan metode konvensional dalam pengarsipan, yang menghambat efektivitas pelayanan publik. Kondisi ini mendorong perlunya penerapan sistem informasi kearsipan yang lebih modern dan terstruktur guna meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam administrasi desa.

1.2 Permasalahan Mitra

Mitra dalam kegiatan ini adalah pemerintah desa yang mengalami beberapa permasalahan utama dalam sistem pengarsipan mereka, antara lain:

1. Kesulitan dalam menemukan kembali dokumen karena pencatatan manual yang tidak terorganisir dengan baik.
2. Risiko kehilangan atau kerusakan arsip akibat faktor lingkungan seperti kelembaban dan serangan hama.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola arsip secara efektif.
4. Minimnya penggunaan teknologi dalam administrasi desa, yang berimbas pada lambatnya proses pelayanan publik. Permasalahan ini berdampak langsung terhadap efektivitas kerja perangkat desa serta kepuasan masyarakat dalam menerima layanan administrasi.

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip di pemerintah desa melalui sistem informasi berbasis digital.
2. Mempermudah pencarian dan akses dokumen dengan sistem pengarsipan yang lebih terstruktur.
3. Mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan dokumen dengan penyimpanan yang lebih aman.
4. Meningkatkan keterampilan perangkat desa dalam penggunaan teknologi informasi untuk administrasi desa.

1.4 Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini meliputi:

1. Pemerintah desa dapat mengelola arsip lebih cepat dan efisien.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola administrasi desa.
3. Meminimalkan potensi kehilangan data penting.
4. Masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan akurat.
5. Perangkat desa lebih siap dalam menghadapi digitalisasi administrasi desa.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. **Analisis Kebutuhan:** Mengidentifikasi kebutuhan pemerintah desa terkait sistem informasi kearsipan.
2. **Perancangan Sistem:** Merancang sistem informasi kearsipan yang sesuai dengan kebutuhan mitra.
3. **Implementasi dan Uji Coba:** Memasang dan menguji sistem di lingkungan kerja perangkat desa.
4. **Pelatihan Pengguna:** Memberikan pelatihan kepada perangkat desa tentang penggunaan sistem.
5. **Evaluasi dan Monitoring:** Mengevaluasi efektivitas sistem serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Hasil dari pelaksanaan program Penerapan Sistem Informasi Kearsipan untuk Pemerintah Desa:

3.1.1 Hasil Pelaksanaan Program

Setelah program dilaksanakan, beberapa hasil yang dicapai antara lain:

1. Sistem informasi kearsipan telah berhasil diterapkan di pemerintah desa.
2. Perangkat desa lebih memahami cara mengelola arsip secara digital.
3. Waktu pencarian dokumen berkurang secara signifikan.
4. Terdapat peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan arsip.

3.2 Pembahasan

Luaran konkret dari kegiatan ini meliputi:

1. Aplikasi sistem informasi kearsipan berbasis digital.
2. Modul pelatihan pengelolaan arsip digital.
3. Peningkatan keterampilan perangkat desa dalam pengelolaan dokumen.
4. Data arsip yang terdokumentasi lebih rapi dan mudah diakses.

Dengan adanya penerapan sistem informasi kearsipan ini, diharapkan pemerintah desa dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dalam tata kelola administrasi.

Foto Kegiatan



Gambar 1. Foto Kegiatan

4. KESIMPULAN

Penerapan sistem informasi kearsipan untuk pemerintah desa telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Dengan sistem digital yang diterapkan, pencarian dokumen menjadi lebih cepat, risiko kehilangan data dapat diminimalkan, serta transparansi administrasi desa semakin meningkat. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa telah meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola arsip secara modern, yang pada akhirnya mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

4.1 Rekomendasi

Agar program ini dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan adalah:

1. **Peningkatan Kapasitas SDM** – Pemerintah desa perlu rutin melakukan pelatihan bagi perangkat desa baru agar tetap dapat mengoperasikan sistem informasi kearsipan dengan baik.

2. **Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem** – Diperlukan pemeliharaan berkala serta pembaruan sistem agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan desa.
3. **Integrasi dengan Sistem Lain** – Sistem informasi kearsipan dapat dikembangkan lebih lanjut agar terintegrasi dengan sistem administrasi desa lainnya untuk meningkatkan efisiensi kerja.
4. **Dukungan Kebijakan dan Regulasi** – Pemerintah desa perlu menerapkan kebijakan yang mendukung penggunaan sistem informasi kearsipan agar menjadi bagian dari prosedur standar dalam pengelolaan administrasi.
5. **Monitoring dan Evaluasi** – Evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem harus dilakukan untuk memastikan sistem tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal.

Dengan adanya keberlanjutan program ini, diharapkan seluruh desa dapat mengadopsi sistem informasi kearsipan digital untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

REFERENCES

- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). Pedoman Pengelolaan Arsip Desa. Jakarta: Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
- Pressman, R. S. (2015). Software Engineering: A Practitioner's Approach. New York: McGraw-Hill.
- Darmawan, D. (2020). Teknologi Pembelajaran Berbasis TIK. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahyudi, H. (2022). Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(1), 56–67.
- Arifin, Z. (2020). Implementasi E-Government di Tingkat Desa. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 7(2), 113–122.
- Nuraini, L. (2021). Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Kearsipan. Jurnal Informatika dan Komputer, 6(1), 20–28.
- ISO 15489-1. (2016). Information and Documentation — Records Management. International Organization for Standardization.
- Budi, A. (2018). Manajemen Arsip Digital di Lembaga Publik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). Strategi Transformasi Digital Nasional. Jakarta: Kemenkominfo.